

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN DEMOKRASI
DALAM PEMILIHAN RT DI KELURAHAN TANJUNG KUPANG
(STUDI DI KELURAHAN TANJUNG KUPANG KECAMATAN TEBING
TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG SUMSEL).”**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Nama : Parizon

NPM : 1421020103

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
H/2019 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN DEMOKRASI
DALAM PEMILIHAN RT DI KELURAHAN TANJUNG KUPANG
(STUDI DI KELURAHAN TANJUNG KUPANG KECAMATAN TEBING
TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG SUMSEL).**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah



Program Studi : Siyasah syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H

Pembimbing II: Eko Hidayat, S.Sos., M.H..

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan UUD NRI tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kelurahan tanjung kupang sama hal nya seperti kelurahan yang ada di seluruh wilayah indonesia. Untuk menjalankan suatu roda pemerintahan diperlukan suatu sistem pemerintahan yaitu mulai dari kepala kelurahan, sekretaris kelurahan sampai ke aparaturnya yang paling bawah seperti RT. Dalam hal ini diperlukan penunjukan tugas sebagai RT yang seharusnya di pilih berdasarkan pemilihan umum atau secara demokrasi maupun secara musyawarah.. Sesuai yang tertera dalam Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan pasal 29 (1) yaitu : Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Dalam konsep Islam musyawarah dikenal dengan syura, Secara etimologi kata “syura” berasal dari kata sya-wa-ra yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata syura dalam bahasa indonesia menjadi musyawarah mengandung makna sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat untuk memperoleh kebaikan. Sehingga hasil dari musyawarah itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi?

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan demokrasi di kelurahan tanjung kupang masih banyak yang harus diperbaiki, dikarenakan penerapan peraturannya masih belum berjalan sesuai undang-undang yang berlaku dan masih banyak masyarakat yang belum berperan aktif dalam konteks pesta demokrasi di kelurahan tanjung kupang. serta masih banyak yang harus diperbaiki lagi baik dari segi etika tata cara, transparansi, keterbukaan baik di dalam panitia pemilihan, di pihak kelurahan, maupun di pihak masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Dan islam sendiri telah mengajarkan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan orang banyak sebaiknya dilakukan secara musyawarah mufakat, agar keputusan tersebut dapat diterima oleh semua golongan masyarakat.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya maka skripsi saudara :

Nama : Parizon
NPM : 1421020103
Prodi Studi : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT Di Kelurahan Tanjung Kupang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel).**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,


Drs. H. Harvanto H., M.H
NIP. 195612051983031002

Pembimbing II,


Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197509302003121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah**


Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN RT DI KELURAHAN TANJUNG KUPANG (STUDI DI KELURAHAN TANJUNG KUPANG KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG SUMSEL)** di susun oleh **Parizon, npm 1421020103**, program study : **Siyasah Syar'iyah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : **Rabu, 6 Maret 2019.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Jayusman.M.Ag.

Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I.,M.H.I.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.

Penguji II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

DEKAN

Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag

NPM 197009011997031002

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”
(Ali-Imran 159).¹



¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid&Terjemah, (Surakarta: Al-Karim, 2009).hal,71.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayah Tamrindan Ibu Suriyati yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendoakan setiap langkah selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakak tersayang Jonis Purnawirawan, Weni, S.Pd.I., Diana, M.Pd.I., Anita, S.E.I dan kakak ipar Karnila, Gusmedi Sabarudin, S.Pt., M.Pd., serta keponakanku tersayang Rajab, Tanzilal Riyan Dica, Pirzi Ayu Rizki yang selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Pembimbing Akademik saya yang tak hentinya mendukung saya.
4. Almamater tercinta

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Parizon, di lahirkan di Talang Banyu pada tanggal 24 April 1997.

Parizon merupakan anak ke kelima dari lima (5) bersaudara, yang mempunyai kakak bernama Jonis Purnawirawan, Weni,S.Pd.I., Diana,M.Pd.I., Anita,S.E.I yang lahir dari pasangan AyahandaTamrin dan Ibunda Suriyati.

Adapun pendidikan yang di tempuh :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan lulus pada tahun 2008.
2. Madrasah Stanawiyah (MTS) Negeri Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan lulus pada tahun 2011.
3. Melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan lulus pada tahun 2014.
4. Pada tahun yang sama 2014 di terima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan mengambil Program Studi Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan Ihsan serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT Di Kelurahan Tanjung Kupang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel).” dapat diselesaikan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Alamsyah , S.Ag, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
2. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyyah UIN Raden Intan Lampung dan Frenki.M.Si. selaku sekretaris jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Drs. H. Haryanto H, M.H. selaku pembimbing I dan Eko Hidayat, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

4. Segenap dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan materi-materi selama ini, guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan dan karyawan baik perpustakaan Fakultas Syari'ah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, referensi dan lain-lain.
6. Kuucapkan juga terimakasih kepada guru-guru ku dari SD, MTS, sampai SMA yang tidak bisa kusebutkan satu persatu namanya, berkat kesabaran merekalah yang telah ikhlas mendidiku, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dari saya yang tidak tau apa-apa menjadi tau dan paham pentingnya pendidikan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini jasa mu akan kukenang sampai akhir masa.
7. Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yaitu Andika Wandayanti, Andriyansyah, Bagus Prido Zaini, Desya Fitri, Hipzoni, Kurnia Sulistya Zahra, Hani Mulya Putri, Marsili Yansyah, M. Husaini, Peni Fitriyanti, Riyan, Syaifudin, Selfi Merliani, Wahyu Samanhudi, Windu Fitria, yang telah memberikan semangat, menemani serta membantu selama proses belajar di bangku perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tulung Agung kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Annisa Ulya, Ayunda Asoka Putri, Erieoca Sefitri yang telah memberikan semangat dan membantu selama proses penyusunan skripsi.

9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Desember 2018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang.....	5
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Demokrasi.....	17
1. Pengertian demokrasi dalam islam.....	17
2. Pengertian Demokrasi Secara Umum.....	18
B. Asas Dan Dasar Hukum Demokrasi.....	20
1. Asas Dan Dasar Hukum Demokrasi Dalam Pemerintahan Islam.....	20
2. Asas Dan Dasar Hukum Demokrasi indonesia.....	26
C. Pengangkatan Pemimpin	28
1. Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam	28
2. Pengangkatan Pemimpin Dalam Sistem Politik Indonesia.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN TANJUNG KUPANG KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG SUMSEL

A. Profil Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel.....	57
1. Sejarah Singkat Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel	57
2. Visi, Misi Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel	57

3. Struktur Organisasi Dan Ketenagaan Di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel.....	58
4. Daftar nama perangkat kelurahan tanjung kupang kecamatan tebing tinggi	59
5. Rekapitulasi Penduduk Tahun 2018.....	61
B. Praktik Demokrasi Pemilihan Aparatur Desa Di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel	63

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT Di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ?.....	69
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan ketua RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang (Studi Di Kelurahan Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan)**. Untuk menghindari kesalah pahaman judul di atas, maka perlu ditegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

2. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah, fiqh itu sendiri adalah upaya sungguh sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh setiap muslim. Sedangkan siyasah berasal dari kata sasa, yasusu yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau

¹ Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.² Siyasah pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan sesuatu masalah. *Siyasah* juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic and policy*). Menurut Ibnu ‘Aqil *siyâsah* adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kefasadan (kerusakan).³ Jadi, *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi tinjauan *fiqh siyasah* adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data untuk menggali hukum-hukum *syara’* dan memecahkan suatu persoalan sehingga dapat diamalkan oleh setiap muslim.

3. Penerapan Demokrasi

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang

² Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta : prenamedia group, 2016) hal, 4

³ AL-‘ADALAH Vol. X, No. 3 Januari 2012, Irwantoni: Peranan Siyâsah Syar’iyyah dalam Memahami Nas-Nas Agama, diakses dari <https://ejournal.radenintn.ac.id.html> tanggal 20 februari 2018.

dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan⁴

Demokrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln yaitu suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.⁵

Jadi, penerapan demokrasi adalah cara atau hasil untuk mencapai suatu tujuan kekuasaan dan kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas.

⁴<https://www.belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2018/2/pengertian-penerapan.html>

⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Jakarta : Prenamedia Group, 2003) Hal. 66

4. RT (Rukun Tetangga)

RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.⁶

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT Di Kelurahan Tanjung Kupang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel).”

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul proposal “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan)” adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Masalah demokrasi merupakan faktor penting untuk menciptakan keberhasilan pengelolaan daerah terutama dalam otonomi daerah. Dan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan kinerja nya. Dari survei awal peneliti terlihat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemilihan aparatur kelurahan sehingga mengakibatkan masyarakat kurang aktif

⁶ Peraturan Bupati Empat Lawang Nomer 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Empat Lawang.

dalam berdemokrasi dalam pemilihan aparatur kelurahan. Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan aparatur di kelurahan khususnya pemilihan RT di kelurahan tanjung kupang. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang sedang ditekuni oleh penulis.

2. Alasan Subjektif

- a. Banyak buku-buku referensi yang membahas tentang penerapan demokrasi
- b. Judul proposal ini sesuai dengan disiplin ilmu yang pelajari yaitu di fakultas syari'ah jurusan siyasah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Demokrasi yang di anut di Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan. Mengenai sifat – sifat dan ciri - cirinya terdapat berbagai penafsiran serta pandangan. Tetapi yang perlu kita pahami bersama dan tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi Konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.⁷

Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun

⁷ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

pemerintah daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman.⁸

Dengan adanya sistem pemilihan umum diharapkan penerapan demokrasi tercapai seutuhnya yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mencapai dan mendukung demokrasi ini, perlu didukung oleh enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat pluralisme., yaitu : pertama, kesadaran akan adanya pluralisme. Kedua, Musyawarah. Ketiga, sejalan dengan tujuan. Keempat, ada norma kejujuran dan mufakat. Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Keenam, adanya trial and error (percobaan dan salah).⁹ Sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kelurahan Tanjung Kupang sama hal nya seperti kelurahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menjalankan suatu roda pemerintahan diperlukan suatu system pemerintahan yaitu mulai dari kepala kelurahan, sekretaris kelurahan sampai ke aparatur yang paling bawah seperti RT. Dalam hal ini diperlukan penunjukan tugas sebagai RT yang seharusnya di pilih berdasarkan pemilihan umum atau secara demokrasi maupun secara musyawarah.

Pemilihan Aparatur kelurahan di Kelurahan Tanjung Kupang bertujuan untuk menjalankan suatu sistem demokrasi yang dianut oleh

⁸ Muhammad mansyur amin dan Muhammad najib, agama, demokrasi, dan transformasi social (jogyakarta : LKSM. 1997) hal. 40

⁹ Andi Malarangeng, Dkk. Kajian Pemilu 1999.(Jakarta: Pusat Kajian Etika Dan Pemerintah (PUSKAP), 1999).Hal,34

Negara Indonesia, Indonesia sendiri dalam menentukan pemimpin seperti menunjuk presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, kepala desa, bahkan sampai ketingkat terendah yaitu RT menggunakan sistem demokrasi yaitu dengan cara pemilihan umum. Sesuai yang tertera dalam Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan pasal Pasal 29 (1) yaitu : Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;

Akan tetapi masalah yang timbul masih ada di beberapa wilayah di Indonesia khusus di Kelurahan Tanjung Kupang demokrasi nya masih belum sepenuhnya dijalankan, masih banyak pemilihan RT yg ditunjuk secara langsung oleh pemerintahan setempat dan hanya satu wilayah yang pemilihannya dilakukan secara demokrasi yaitu di RT Sungai Langsung.

Istilah demokrasi dalam sejarah Islam tetap lah asing, karena sistem demokrasi tidak pernah di kenal oleh kaum muslimin sejak awal. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan (*al hurriyah*) yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak jaman Nabi Muhammad Saw, termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama (*syura*), kebebasan mengkritik penguasa, dan kebebasan berpendapat. Kata *syura* sendiri berasal dari *sya-wara* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹⁰ Sejalan dengan pengertian ini, kata syuro atau dalam bahasa

¹⁰ Ibnu Manzur, Lisanul 'arab, (Bairut: Dar Al-Syadir, 1968), Jilid 4 Ham.143.

Indonesianya menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan syuro merupakan sesuatu yang baik dan berguna dalam kehidupan manusia.¹¹ Dalam Al-qur'an Allah Swt memerintahkan kepada nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.¹² Salah satu contoh nabi Muhammad Saw merupakan orang yang demokratis yaitu mendirikan negara Madinah berdasarkan kontrak sosial (al 'aqd al ijtima'i) antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, Kristen, dan kaum Arab pagan yang berdiam di Madinah dan membentuk piagam madinah sebagai UUD yang berlaku di Madinah.



فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Adapun hadist tentang demokrasi atau musyawarah sebagai berikut:

¹¹ Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam wa adillatuhi "jihad, pengadilan dan mekanisme mengambil keputusan, pemerintahan dalam islam . (Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fiqh, 2007) hal. 326

¹² Muhammad Iqba, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakkarta Prenada Media Grob, 2014) Hal.214.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ. (رواه الترمذي و أبو داود).

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda “ Musyawarah adalah dapat di percaya.” (HR. At tirmidzi dan Abu daud)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan RT Di Kelurahan Tanjung Kupang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel). dimana penelitian ini membahas tentang apakah penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan aparat desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaa pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaa Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaa pemilihan RT di kelurahan tanjung kupang kecamatan tebing tinggi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah

terhadap pelaksanaan pemilihan ketua RT di kelurahan tanjung kupang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan dan kemajuan demokrasi di kelurahan tanjung kupang agar lebih paham akan pentingnya memilih aparatur kelurahan, supaya masyarakat lebih berperan aktif lagi dalam berdemokrasi., serta bermamfaat pula bagi penelitian-penelitian lainnya.

1) Secara praktis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir dalam keilmuan di bidang hukum tata negara.

b) Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan memperbanyak wawasan dalam memahami arti penting demokrasi dalam pemilihan aparatur kelurahan di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sum-Sel.

E. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif.

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Reaserch*), yaitu penelitian yang terjun langsung kelokasi kelurahan tanjung kupang kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang yang menjadi objek penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.¹³

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah *empirisanalatik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*fact finding*) serta menentukan korelasi antara yang satu dan yang lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku.¹⁴

¹³ Anton Bakker, *metode-metode filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). H. 10.

¹⁴ Surtisno Hadi, *metodologi research* (Yogyakarta: fak Psikologi UGM, 1985), h.3

2. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda, pola, sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala lurah, ketua RT, dan masyarakat di kelurahan tanjung kupang.

b. Sampel

Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sample yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* adalah pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sample yang diperlukan. *Purposive sampling* juga disebut dengan *judgemental sampling* yaitu pengambilan sample berdasarkan penilaian (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sample. Oleh karenanya, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sample yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sample yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian kriteria yang pantas dijadikan sample pada penelitian ini adalah:

1. Kepala lurah
2. Ketua RT
3. Tokoh masyarakat

Maka dalam hal ini penentuan sample dalam penelitian ini diambil dari kepala lurah 1, 3 RT , 3 tokoh masyarakat.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah “Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali” Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dalam hal ini yakni terdiri dari wawancara yang dilakukan lurah , RT, tokoh Masyarakat di Kelurahan Tanjung Kupang beserta aparat-aparatur kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang di dapat dari literature dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan

cara mengadakan Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekacuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan. Interview ditunjukan Kepala lurah, ketua RT, dan Masyarakat di kelurahan Tanjng Kupang beserta aparat-aparatur kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi Yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan serta buku-buku yang ada.¹⁵

5. Metode Pengolaan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009),h.57-66

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁶
- b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrument penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpung dan mengolah data yang sudah ditentukan, setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode analisi.¹⁸

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h 115

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h 45

¹⁸Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti 2004) h. 127.

Dalam menganalisis, peneliti mula-mula mengumpulkan data dengan pertanyaan kepada responden, kemudian peneliti menghitung satu-persatu dan mengklasifikasikan kesimpulan pertanyaan itu sehingga diketahui berapa jumlah persentase yang dihasilkan. Setelah itu, peneliti memadukan hasil pertanyaan kepada responden dengan wawancara, dengan menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi Dalam Islam

Kata demokrasi berasal dari yunani yaitu demos dan cratos/cratein, demos yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Dalam demokrasi Islam dikenal dengan syura, Secara etimologi kata “syura” berasal dari kata sya-wa-ra yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata syura dalam bahasa indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syuro merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia.¹⁹

Kata syura dalam bahasa Arab berarti menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas. Kata tersebut sama sekali tidak menunjukkan pada perolehan pendapat mayoritas atas satu keputusan lewat pemungutan

¹⁹ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,(Jakarta:Kencana 2014,) hlm. 214

suara. Dari sisni, bisa kita jumpai dalam bahasa Arab istilah syara al-a‘‘sal yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau memetik, lalu mengambilnya dari sarang dan tempatnya.²⁰ Menurut Ibnu ‘Aqil siyâsah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kefasadan (kerusakan).²¹

Syura (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islam dan pada prinsipnya syura mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Ketentuan Qur‘‘ani disampaikan dalam term-term yang tidak hanya berisikan masalah-masalah pemerintah tetapi juga mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dan pekerja. Dan sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat

2. Pengertian demokrasi dalam sistem politik secara umum

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahsa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan

²⁰ Khalil Abdul Karim, Syari‘ah sejarah perkelahian dan pemaknaan, (Yogyakarta:LKIS, 2003), hlm. 139-140

²¹ AL-‘ADALAH Vol. X, No. 3 Januari 2012, Irwantoni: Peranan Siyâsah Syar‘iyyah dalam Memahami Nas-Nas Agama, diakses 20 september 2018.

rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang telah dikatakan oleh Abraham Lincoln suatu pemerintahan dari, oleh, rakyat dan untuk rakyat. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan (*institutionalization of free-dom*).

22

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan yakni keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²³

²² A. Ubaedillah & Abdul rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani (Jakarta: PRENADAMEDIA GROP, 2003). Hal.66-67

²³ Dede Rosyada dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 110.

B. Asas Dan Dasar Hukum Demokrasi

1. Asas Dan Dasar Hukum Demokrasi Dalam Pemerintahan Islam

a. Asas hukum demokrasi dalam pemerintahan islam

Syaukani (2003: 28) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu sebagai berikut:

1) Asas legalitas

Bahwa setiap tindakan administrasi Negara harus memiliki dasar hukum (ada peraturan tertulis yang mendasarinya). Terlebih untuk Negara hukum, sehingga asa legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemetintahan. Legalitas yang digunakan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Sebagaiman dalam konsepsi politik islam yang dulu dicita-citakan kaum santri bahwa syariat merupakan panglima dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

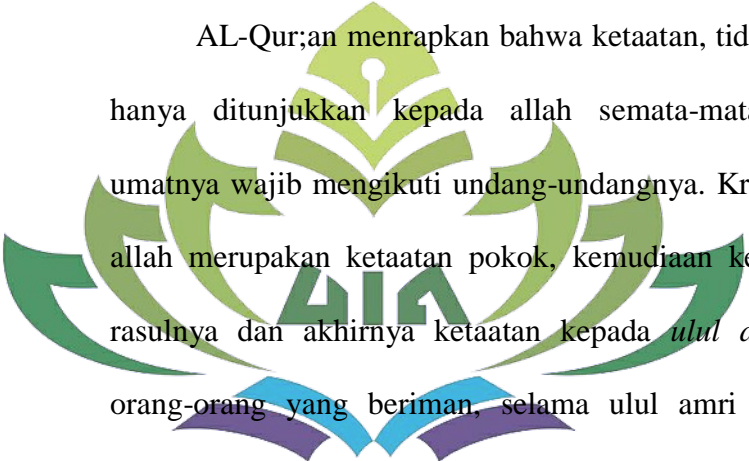
2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas ini merupakan jabatan antara norma hukum dan norma etika yang merupakan norma yang tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupak suatu bagian yang pokok nbagi pelaksanaan hukum tata pemerintah atau administrasi Negara dan merupakan suatu bagian yang penting sekali bagi perwujudan

pemerintahan Negara dalam arti luas. Dengan demikian, asa merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berfikir, berpendapat dan sebagainya.²⁴

Suyuti pulungan (1995: 5-8), menyebutkan dasar dari Al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga neagara dalam *siyasah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Kedaulatan tertinggi ditangan Allh SWT



AL-Qur'an menrapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya ditunjukkan kepada allah semata-mata dan semua umatnya wajib mengikuti undang-undangnya. Krtaatan keapada allah merupakan ketaatan pokok, kemudiaan ketaatan kepada rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada *ulul amri* di antara orang-orang yang beriman, selama ulul amri tersebut tidak memerintahkan maksiat keapada allah.

b) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai hak di depan undang-undang allah yang harus di laksanakan oleh mereka semua.

c) Prinsip persamaan musawah

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Termologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 121-123

Semua warga Negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa.

d) Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin neagra dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai penadapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Perlunya musyawarah disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut:

1. Setiap manusia memilki kepentingan yang berbeda
2. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda
3. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
4. Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.²⁵

b. Berikut dasar hukum demokrasi dalam islam:

1. Surah Ali Imran Ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

²⁵ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Termologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 121-131

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²⁶

Sebab-sebab turun ayat ini kepada nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ra menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang badar, Rasulluloh SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar ra Dan Umar Bin Khattab ra untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang, Abu Bakar ra berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kekeluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun, umar bin khattab berpendapat mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintahkan membunuh mereka adalah keluarganya. Rasulluloh SAW kesulitan dalam memutuskan perkara ini. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas Abu Bakar.²⁷

Pada saat peristiwa perang uhud yang banyak mengundang emosi umat manusia untuk marah. Namun demikian, cukup bnyak bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi muhammad saw beliau bermusyawarah engan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan,

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemah, (Surakarta: Al-Karim, 2009).hal,71.

²⁷ Dapartemen agama ri, alquran tafsir perkata tajwid kode angka al-hidayah. (banten : karim, 2011) hlm ,72

beliau tidak memaki dan mempermasalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain lain. Salah satu yang menjadi penekanan pada ayat ini adalah perintah musyawarah. Ini penting karna petaka yang terjadi pada perang uhud didahului oleh musyawarah serta disetujui oleh mayoritas. Ayat ini dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.²⁸

2. Surah Asy-Syuura Ayat 38 :



وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya :

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.²⁹

Ayat diatas menyatakan: Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang orang yang benar benar memenuhi seruan tuhan mereka dan melaksanakan solat secara kesinambungan dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syratnya juga dengan khusuk kepada allah, dan semua urusan urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah bermusyawarah

²⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan, Keserasian Al- Quran”, Vol.2,(Jakarta : Lentara Hati, 2012), hal.321.

²⁹ Departemen Agama RI, opcit, h. 487.

antara mereka, tidak ada diantara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya, dan disamping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun lainnya, mereka senantiasa secara tulus dan serta bersinambung, baik nafkah wajib maupun sunah.

Kata *amruhum*/urusan mereka menunjukkan bahwa yang mereka musyawakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karna itu masalah ibadah *mahdhah/murni* yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidak termasuk hal-hal yang dapat dimusyawakan. Disisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan yang dimaksud tidak perlu terlibat dalam musyawarah, kecuali jika diajak oleh orang yang berwenang karna boleh jadi hal yang dimusyawakan oleh mereka adalah persoalan rahasia antara mereka.³⁰

3. Hadist dari Al Adabun Nabawi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْتَشَارُ رُؤُوسُ تَمَنٍّ . (رواه الترمذي و ابو داود).

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda “Musyawarah adalah dapat di percaya.” (HR. At tirmidzi dan Abu daud)³¹

³⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan, Keserasian Al- Quran”, Vol.12,(Jakarta : Lentara Hati, 2012), 177-178.

³¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), jilid. 1, hal. 203

4. Hadist dari Thabrani,

قال علي: يا رسول الله أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم يخص فيه بينة منك؟ قال: تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ولا تقضونه برأي خاصة. (رواه الطبراني)

Artinya:

Ali berkata pada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika tampak suatu persoalan pada kami yang belum ada dalam al-Qur’an dan tidak ada keterangan jelas di dalamnya?” Rasulullah bersabda, ‘Kalian mengadakan musyawarah dalam persoalan dengan hamba-hamba mu’min dan jangan memutuskan pendapat sendiri. (HR. Thabrani)³²

2. Asas Dan Dasar Hukum Demokrasi Indonesia

a. asas asas demokrasi indonesia

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

- 1) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
- 2) Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.³³

³² Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, jilid. 11, hal.371

³³ Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008), hlm. 44

b. Dasar hukum demokrasi indonesia

- 1) Terdapat dalam pancasila, sila ke 4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
- 2) Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berisi “ kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang - undang dasar.”³⁴
- 3) Pasal 28 UUD 1945 yang berisi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.³⁵
- 4) Pasal 28E UUD 1945 ayat 3 yang berisi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.³⁶
- 5) UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 34 (1) yaitu : kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.³⁷
- 6) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2015 tentang kelurahan pasal 16 (1) yaitu pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian.³⁸
- 7) Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan pasal Pasal 29 (1) yaitu : Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota

³⁴ UUD NRI 1945

³⁵ UUD NRI 1945

³⁶ UUD NRI 1945

³⁷ UU No 6 Tahun 2014 tentang desa

³⁸ Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2015 tentang kelurahan

masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;³⁹

C. Pengangkatan Pemimpin

1. Pengangkatan pemimpin dalam islam.

a. Dasar kepemimpinan

1. Surat Al baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴⁰

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan arti khalifah sebagai berikut : “Khalifah pada mulanya berarti “yang menggantikan” atau “yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya”. Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan.

³⁹ Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemah, (Surakarta: Al-Karim, 2009).hal,10

Dengan pengangkatan itu Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini.”⁴¹

2. Hadits Nabi berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan kepemimpinan ini. Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (أَبُو دَاوُد)

Artinya:

dari Abi Said al-Khudriy, sesungguhnya Rosululloh saw bersabda : ketika tiga orang keluar dalam (untuk) bepergian maka hendaklah mereka menjadikan salah satu mereka (sebagai) amir/pemimpin. (Hr. Ibnu Daud)⁴²

3. Rasulullah SAW menunjuk abu bakar menjadi imam sholat tatkala Rasulullah SAW sedang sakit.

b. Syarat-syarat imam

Syarat imamah yang telah disepakati oleh para fuqoha dalam kitab fiqh merupakan penjelasan dari syarat syarat imamah tersebut diatas, seperti sebagai berikut :

1. Kisah mu’az bin jabal Dalam kecerdasan otak dan keberaniannya mengemukakan pendapat, Mu'az hampir sama dengan Umar bin Khathab. Ketika Rasulullah SAW hendak mengirimnya ke

⁴¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan, Keserasian Al- Quran”, Vol.1,(Jakarta : Lentara Hati, 2012), hal. 140

⁴² No. 2608. Asy-Syaikh al-Albani *rahimahullah* berkata dalam *ash-Shahihah* no. 1322, “Sanadnya hasan.” No. 2608. Asy-Syaikh al-Albani *rahimahullah* berkata dalam *ash-Shahihah* no. 1322, “Sanadnya hasan.”

Yaman, lebih dulu ditanyainya, "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'az?" "Kitabullah," jawab Mu'az. "Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam Kitabullah?", tanya Rasulullah pula. "Saya putuskan dengan Sunnah Rasul." "Jika tidak kamu temui dalam Sunnah Rasulullah?". "Saya penggunaan pikiranku untuk berjihad, dan saya takkan berlaku sia-sia," jawab Muaz. Maka berseri-serilah wajah Rasulullah. "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhai oleh Rasulullah," sabda beliau.

Dan mungkin kemampuan untuk berjihad dan keberanian menggunakan otak dan kecerdasan inilah yang menyebabkan Mu'adz berhasil mencapai kekayaan dalam ilmu fiqh, mengatasi teman dan saudara-saudaranya hingga dinyatakan oleh Rasulullah sebagai "orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram".⁴³

2. Kisah abu bakar menjadi imam sholat tatkala Rasulullah SAW sedang sakit.

Berikut sebuah hadits yang menceritakan Abu Bakar saat menjadi Imam pada shalat berjamaah tatkala Rasulullah sedang sakit. Diriwayatkan dari 'Ubaidullah bin 'Abdillah r.a.: Saya mendatangi 'Aisyah r.a., saya berkata kepadanya, "Sudikah engkau menceritakan tentang sakit Rasulullah SAW?" Dia

⁴³ Astry islam, muadz bin jabal "cendikiawan muslim yang menguasai ilmu fiqh serta paling tau hal dan haram", (bandung : titian ilmu, 2007). Hal. 31

menjawab, "Ya, setelah Nabi SAW sakit parah, beliau bertanya, 'Apakah orang orang sudah shalat?' Kami menjawab, 'Belum, mereka sedang menunggu engkau wahai Rasulullah.' Beliau berkata, 'Ambilkan air untukku di bejana itu!' Kami pun melaksanakannya, lalu beliau mandi. Setelah itu, beliau berusaha untuk bangun, tetapi beliau pingsan. Setelah siuman, beliau bertanya, 'Apakah orang orang sudah shalat?' Kami menjawab, 'Belum, mereka sedang menunggu engkau wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Ambilkan air untukku di bejana itu! ' Kami pun melaksanakannya, lalu beliau mandi. Setelah itu, beliau berusaha bangun, tetapi beliau pingsan kembali. Setelah siuman, beliau bertanya, 'Apakah orang orang sudah shalat? 'Kami menjawab, 'Belum, mereka sedang menunggu engkau wahai Rasulullah. ' Beliau bersabda, 'Ambilkan air untukku di bejana itu! 'Kami pun melaksanakannya, lalu beliau mandi. Setelah itu beliau berusaha untuk bangun, tetapi beliau pingsan kembali. Setelah siuman, beliau bertanya, 'Apakah orang orang sudah shalat? 'Kami menjawab, 'Belum, mereka sedang menunggu engkau wahai Rasulullah. 'Aisyah berkata, "Waktu itu orang orang sedang berdiam di masjid menunggu Rasulullah SAW mengerjakan shalat isyanya yang terakhir. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Abu Bakar agar dia mengimami orang orang shalat berjamaah. Utusan itu pergi kepadanya dan

memberitahukan bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengimami orang-orang shalat berjamaah. Lalu Abu Bakar r.a., seorang yang sangat halus perasaannya, berkata, 'Wahai 'Umar, shalatlah bersama orang-orang menjadi imam! 'Umar berkata, 'Engkaulah yang lebih berhak menjadi imam. 'Lalu Abu Bakar menjadi imam dalam beberapa hari itu. Setelah Rasulullah SAW merasa sakitnya berkurang, beliau menuju masjid dengan dipapah oleh dua orang laki-laki, salah satunya 'Abbas, untuk mengerjakan shalat zuhur, sedangkan Abu Bakar waktu itu sedang mengimami orang-orang shalat berjamaah. Setelah Abu Bakar melihat beliau, dia mundur dari tempatnya, tetapi Nabi SAW memberi isyarat agar dia tetap di tempatnya. Lalu beliau berkata kepada dua orang yang memapahnya agar beliau didudukkan di samping Abu Bakar. Lalu beliau pun didudukkan di samping Abu Bakar, ketika itu Abu Bakar berdiri mengikuti shalat Nabi SAW, orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar, sedangkan Nabi SAW mengerjakan shalat sambil duduk. 'Ubaidullah berkata, "Saya menemui 'Abdullah bin Abbas r.a dan berkata kepadanya, 'Maukah saya sampaikan kepada engkau mengenai cerita 'Aisyah tentang sakit Nabi SAW?. 'Dia menjawab, 'Ya, sampaikanlah kepadaku!. "Lalu saya ceritakan hadits 'Aisyah itu kepadanya, tetapi dia sama sekali tidak menyangkalnya, tetapi dia berkata, 'Apakah 'Aisyah menyebutkan

nama orang yang bersama 'Abbas itu?. 'Saya menjawab, 'Tidak. "Abdullaj bin Abbas berkata, 'Dia adalah 'Ali r.a.'" (HR. Muslim).⁴⁴

Dari pemaparan kisah diatas Para ulama menetapkan tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang dicalon kan dan dinominasika menjadi khalifah atau wajir. Syarat-syarat itu harus tetap dipenuhi selama ia menjadi khalifah atau wajir. Tujuan syarat tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁵

1. Ia memiliki kompotensi dan kepastian yang sempurna, yaitu seorang muslim, merdeka, laki-laki, baliq, dan berakal.
2. *Al-adaalah*, yakni integerasi keagamaan dan moral. Ini adalah syarat-syarat yang diperhitungkan dalam setiap wewenang dan orientasi, yaitu ia adalah orang yang jujur tutur katanya, nyata sifat amanahnya, menjauhkan diri dari keharaman, berhati-hati dan waspada terhadap perbuatan-perbuatan dosa, jauh dari kecurigaan, tetap terjaga kredibilitasnya, baik ketika dalam keadaan senang maupun marah, menjaga muruah, dan kewajibannya sesuai posisi dan statusnya, baik dalam keagamaan dan kenawaiyannya, sebagai mana yang dikatakan oleh al-mawardi.

⁴⁴ Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Abu Bakar Ash- Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) Hal,177

⁴⁵ Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jihad, Pengadilan Dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan Dalam Islam, (Jakarta: Gamma Isnyani, 2011). Hal 360

3. Memiliki kompetensi, kepabilitas, dan kapasitas keilmuan, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang memadai yang bisa digunakan untuk melakukan ijtihad ketika menghadapi berbagai kejadian atau menggali hukum-hukum syara dan yang lainnya berupa hal-hal yang berkaitan dengan *siyasah syar'iyah*.
4. Memiliki kebijaksanaan dan kearifan dalam memandang berbagai permasalahan politik, militer, dan administrasi.
5. Memiliki karakter keperibadian yang kuat, yaitu memiliki karakter yang berani dan tegas sehingga ia mampu menjaga dan melindungi tanah air, melawan musuh, menegakkan hudud, memberikan keadilan kepada pihak yang dianiyaya, dan merealisasikan hukum-hukum Islam.⁴⁶
6. Kapasitas fisik yang memadai, yaitu memiliki indra pendengar, penglihatan, dan lisan yang normal dan masih berfungsi dengan baik, serta memiliki anggota tubuh yang normal sehingga mampu melakukan aktivitas secara baik dan cepat sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁷

c. Pemaparan sejarah langkah-langkah suksesi al-khulafa ar-rasyidun

Berikut ini akan kami paparkan langkah-langkah suksesi al-khulafa ar-rasyidu, agar kita bisa menyimpulkan langkah-langkah syar'i untuk mengangkat imam berikutnya.

⁴⁶Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, Opcit, Hal 145

⁴⁷Ibid. Hal 146

1. Suskesi abu bakar ash-shidiq

Al-bukhari meriwayatkan hadist panjang dalam kitab shohih-nya dari umar bin al-khatthab, diantara isinya: “saat rasullah wafat, kami mendengar kabar bahwa kaum anshar secara keseluruhan juga tidak hadir dalam pembaitan, mereka berkumpul diserambi milik bani sa'idah. Demikian juga dengan ali, zubai, dan beberapa orang lainnya. Sementara itu, kaum muhajirin bergabung bersama abu bakar. Aku katakana padanya, ‘abu bakar, mari kita pergi menemui saudra-saudra kita kaum anshar’.

Kami pun bergegas pergi hingga bertemu dua orang saleh diantara mereka⁴⁸. Keduanya menyampaikan prihal apa yang dilakukan kaum anshar. Keduanya bertanya, ‘hendak kemana kalian, wahai kaum muhajirin? Aku jawab, ‘ kedua orang itu pun berkata, “tidak, jangan mendekati mereka, selesaikan saja urusan kalian, wahai kaum muhajirin’. Abu bakar, ‘demi allah, kami akan temui mereka.’

Kami meneruskan langkah sehingga menemui kaum anshar disemabi milik bani sa'idah. Ternyata mereka tengah berkumpul. Di tengah-tengah mereka ada seseorang yang di selimuti. Akau bertanya, ‘siapa itu?’ mereka menjawab, ‘sa'd bin ‘umadah’. Aku bertanya, ‘kenapa dia?’ mereka menjawab, ‘ia

⁴⁸ Al Hafizh Ibnu Hajar, (*Fathul Bary*, XII/151)

sakit.’ Setelah kami duduk, seseorang diantara mereka berdiri kemudian berkhotbah. Setelah memanjatkan puji dan puja untuk allah, ia menyampaikan:

‘*amma ba’du*, kami adalah para pembela allah dan pasukan islam. Kami wahai kaum muhajirin adalah rombongan nabi kami. Di antara kalian ada yang menyusup. Kalian ingin mengasingkan kami dari asal usul kami. Menjauhkan kami dari urusan khalifah’. Setelah ia terdiam, dan aku ingin angkat bicara. Aku sudah mempersiapkan kata-kata yang sudah membuat ku kagum. Aku ingin menyampaikan kata-kata itu dihadapan abu bakar. Aku sampaikan sesuatu secara meliuk-liuk kepada abu bakar. Ia lebih asabar dan tenang dari pada aku. Lalu abu bakar berkata, ‘tenanglah’.

Aku tidak mau membuat marah. Ia lebih tahu dan lebih tenang dari pada aku. Demi allah, tidak ada satu pun kata-kata yang membuatku kagum, melainkan abu bakar menyampaikannya secara lugas dan lebih baik, hingga aku diam. Setelah itu abu bakar menyampaikan: ‘*amma ba’du*, kebaikan yang kalian sebut itu memang benar karena kalian adalah orang-orang baik. Bangsa arab sendiri tidak mengenal urusan (agama) melainkan karena kaum quraisy. Mereka adalah bangsa arab dengan nashab dan letak geografis terbaik. Aku merestui salah satu dari dua orang ini, pilihlah salah satu diantara keduanya seperti yang kalian

kehendaki.’ Abu bakar meraih tangan ku dan tangan abu ubaidah bin aljjarah. Aku berharap bila saja abau bakar menyampaikan kata-kata lain bukan kata-kata itu.

Demi allah, andai aku maju lalu leherku ditebas sehingga urusan itu tidak dilimpahkan kepadaku, itu lebih aku sukai daripada aku diminta untuk memimpin suatu kaum yang ditengah-tengah mereka ada abu bakar. Setelah itu ada diantara kaum anshar yang berkata, ‘kami adalah tonggak pohon yang digaruk, tandan pohon yang telah dipotong, kami punya pemimpin seperti hal nya kalian wahai kaum quraisy.

Akhirnya muncul banyak sekali kata-kata keliru dan nada suara tinggi hingga kami khawatir terjadi perselisihan. Akhirnya aku berkata, ‘ulurkan tanganmu, bahai abu bakar!’ abu bakakr pun mengulurkan tangan lalu aku membaitnya. Kaum muhajirin turun membait lantas diikuti kaum anshar. Setelah itu kami menghampiri sa’ad bin ubadah namu ia sudah tidak bernyawa. Ada yang bilang, ‘kalian tewlah membunuh sa’ad,’ lalku aku berkata, ‘allah yang mencabut nyawanya’.

Umar meneruskan, ‘demi allah, kami tidak menghalangi satu pun kejaidan yang penting melebihi peristiwa pembantaian abu bakar. Kami khawatir jika kami meninggalkan kaum anshar, kami tidak menjamin tidak aka nada lagi bait setelah itu, sehingga akan muncul dua kemungkinan: kami mengikuti kemauan kaum

anhsar yang tidak sejalan dengan keinginan kami, atau kami menentang mereka dengan begitu akan muncul keonaran. Untuk itu, siapapun yang membait seseorang pemimpin tanpa kesepakatan kaum muslim, maka orang yang dibait dan yang membaitnya tidak sah untuk diikuti. Keduanya harus dibunuh’.

Inilah baiat yang pertama seperti yang disebutkan sejumlah referensi. Pembaitan kalangan terkemuka dan tokoh muhajirin dan anshar terhadap abu bakar. Berikutnya disusul pembaitan kedua secara massalah oleh seluruh kaum muslimin di masjid di atas mimbar.⁴⁹

2. Suksesi umar bin khathab

Pengakuan khalifah umar dilakukan dengan cara yang relative berbeda-beda dalam batas tertentu tetapi tetap keagamaan secara syar’i berdasarkan dalil-dalil sebelumnya. Cara yang dimaksud adalah melalui wasiat penunjukan seorang khalifah sebagai pengganti.

Ibnu jausi berkata,’diriwayatkan dari hasan bin abu hasan, ia berkata,;ketika sakit abu bakar semakin parah dan merasa sudah tidak akan hidup lagi, ia mengumpulkan orang-orang lalu berpesan: ‘sakiy yang kuderita ini semakin parah seperti yang mereka lihat. Aku merasa sebetar lagi akan (mati). Alah telah melepaskan sumpah kalian dari baitaku dan mengembalikan rusan

⁴⁹ Prof. Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, Imamah Uzma, “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam”, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), Hal 164-167

(khalifah) kalian kepada kalian. Karena itu, tunjukkan lah seseorang yang akan memimpin kalian yang kalian sukai. Sebab, jika kalian mengakat seorang pemimpin saat akau masih hidup, itu lebih patut membuat kalian tidak berselisih speneinggalku.’

Mereka kemudian pergi meninggalkan abu bakar sementara persoalan pemilihan pemimpin setelahnya belum menemui titik terang. Kemudian mereka berkata, ’tunjukkan lah seorang (khalifah) untuk kami, wahai khalifah rasulullah.’ Abu bakar bertanya, ’kalian akan berjanji kepada allah dengan rida?’ mereka menjawab, ’ya’. Abu bakar kemudian berkata, ’berilah aku waktu untu memikirkan agam allah dan hamba-hambanya’. Abu bakar kemudian mengirim utusan memanggil utsman bin affan.

Setelah ustman tiba, abu bakar bertanya, ’usulkan kepadaku seseorang (yang pantas menjadi khalifah sepeninggalanku). Demi allah, dimataku, kau layak dan punyantempat untuk itu.’ Utsman berkata, ’umar’. Abu bakar lantas berkara, ’tulislah!’ utsman kemudian menulis suatu wasiat. Setelah sampai pada nama yang dimaksud, abu bakar tidak sadarka diri. Setelah sadara, abu bakar berkata, ’tulislah; umar!’.⁵⁰

Sebagian sahabat nabi mendengar berita bahwa Abdurrahman bin auf dan utsman bin affan menemui abu bakar dan berbicara secara rahasia. Mereka lantas masuk menemui abu

⁵⁰ Manaqib Umar Ibn Khattab, Hal.52

bakar, mereka bertanya, 'apa yang akan engkau katanya pada rabbumu saat bertanya kenapa menunjuk umar sebagai pengantimu, padahal engkau sendiri tahu sikap keras umar?' Abu bakar berkata, 'tolong dudukkan aku,. Kalian menakutiku dengan allah? Rugi sekali orang yang memimpin kalian secara kalim. Aku akan menjawab, 'aku tunjuk hamba terbaik-mu sebagai pengantiku untuk memimpin mereka.' Sampaikan lah kata-kataku ini kepada yang lain.' Setelah itu abu bakar berbaring kemudian memanggil utsman bin affan dan berkata, 'tulislah: *Bismillahirohmannirohim* (dengan nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang). Ini wasiat abu bakar bin abu quhafah diakhir masa hidupnya saat hendak pergi meninggalkan dunia, dan di masa awal akhirat saat mereka memasukinya, saat-saat orang kafir beriman, orang keji yakin dan yang berdusta percaya.

Sungguh, aku menunjuk umar bin khathab sebagai pemimpin kalian sepeninggalanku. Maka dengarkan dan taat lah. Demia allah, aku tidak jemu untuk memberikan kebaikan bagi allah, rasul-nya agamanya, diriku sendiri, dan juga kalian. Jika ada yang mengganti wasiat ini, mak a setiap orang akan mengganggu dosa yang diperbuatnya. Kebaikan juga yang aku inginkan, dan

aku tidak mengetahui hal gaib. Orang-orang zalimkelak akan mengetahui mana tempat yang akan mereka tuju⁵¹.

3. Suksesi utsman bin affan

Didalam kitab shahih-nya, al-bukhari meriwayatkan haidst panjang dan amr bin maimun yang berisi tentang detail peristiwa penikaman umar. Setelah itu umar digorong kerumahnya, kemudian orang-orang berdatangan menjenguk. Disebutkan pula dalam haist ini bahwa orang-orang berkata, 'berwasiatlah, wahai amirul mukminin! Tunjukkan lah siapa yang akan menggantimu sebagai khalifah.' Umar berkata, 'untuk urusan ini, akan tidak menemukan siapapun yang berhak dari orang-orang itu, dimana saat rasullah meninggal dunia, beliau telah rida pada mereka.' Umar kemudian menjebut ali, utsman, az zubair, thalhah, sa'ad dan Abdurrahman. Umar berkata, 'abdulah bin umar hanya menjadi saksi bagi kalian. Ia sama sekali tidak berhak untuk urusan ini. Setelah umar dimakamkan, keenam orang itu berkumpul lalu abdurahman berkata, 'serahkanlah perkara ini kepada tiga orang dari kalian.' Zubair berkata, 'aku melimpahkan wewenang ku kepada ali.' Thalhah berkata, 'aku melimpahkan wewenangku kepada utsman.' Sa'ad pun berlata, 'aku melimpahkan weweangku kepada abdurahman bin auf'. Lalu abdurahhman bin auf berkata, 'siapa dianatara kalian berdua yang akan melepaskan

⁵¹ Prof. Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, Imamah Uzma, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam", (Jakarta: Ummul Qura, 2016), Hal 170-174

dirinya dari perkara ini, kami akan memilihnya. Allah menjadi saksi atasnya dan juga islam bahwa ia akan melihat siapa yang terbaik diantara mereka?’ utsman dan ali diam.

Abdurahman berkata,’apakah kalian bersedia menyerahkan ini kepadaku, dan aku akan memilih siapa yang terbaik dari kalian?’ mereka berdua menjawab,’ya’. Maka ia memegang tangan salah satu dari mereka dan berkata,’engkau memiliki kekerabatan dengan rasullah serta orang pertama yang masuk islam sebagaimana telah engkau ketahui. Allah menjadi saksi atasmu, jika aku memilihmu engkau akan berbuat adil, dan jika aku memilih utsman dan engkau ka mendengar dan mentaatinya’. Kemudia kepada yang lain ia mengatakan hal yang sama. Setelah ia mengambil janji dari mereka, ia berkata,’ ulurkanlah tanganmu, wahai utsman!’ ia pun membaitnya dan disusul oleh ali dan semua orang yang ada didalam rumah’.⁵²

Demikianlah pembaitan utsman berlangsung, atas kesepakatan para sahabat seperti dinyatakan imam ahmad,’para sahabat tidak pernah sepakt membaiat seseorang seperti halnya kesepakatan mereka ketika membaiat utsman’⁵³.

⁵² Al-Bukhori, Kitab , Keutamaan Para Sahabat, Bab 8, Kisah Baiat Dan Kesepakatan Dalam Memilih Ustman.

⁵³ Prof. Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, Imamah Uzma, “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam”, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), Hal. 174-177

4. Suksesi ali bi abi thalib

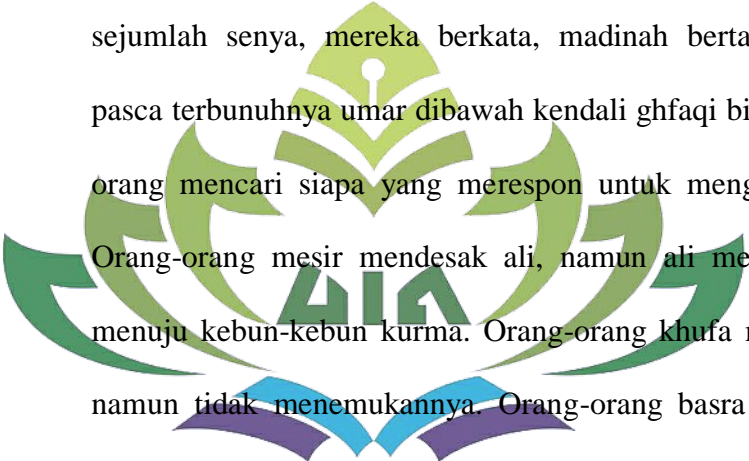
Al-khalal menceritakan: Muhammad bin ali bin Mahmud mengabarkan kepadaku, ia berkata,'abu bakar al-alatshram bercerita kepada kami ia mendiktekan pada kami dari kitabnya, abu badullah bercertita kepada kami, izhab bin yusuf bercerita kepda kami, abdul malik bercerita kepada kami, dari salama bin quhail, dari salim bin abu ja'ad, dari Muhammad bin hanafiah, ia berkata:

Aku sedang bersama ali ketika usman telah dikepung. Lalu seorang datang kepadanya lalu berkata, amirul mukminin telah terbunuh! Lalu datanglah seorang lainnya lalu berkata, amirul mukminin baru saja teebunuh! Maka bangkitlah ali, dan aku segera memegangginya krena khawatir karena keselamatannya. Namun ali berkata, lepaskan lah apa kamu ini.

Muhammad berkata, lalu ali segera pergi ke utsman dan ia berkata terbunuh. Ia pulang kerumahnya dan mengunci pintu. Kemudian orang-orang datang dan mengetuk pintunya. Mereka masuk menemuinya dan berkata, sesungguhnya orang ini telah terbunuh sementara kaum muslimin harus memiliki khalifah dan kami tidak mengetahun siapa yang berhak darimu untuk jabatan ini.

Ali berkata kepada mereka, kalian jangan mengiginkan aku. Aku lebih baik menjadi menteri dari pada menjadi para pemimpin

kalian. Mereka menjawab tidak demi allah, kami tidak mengetahui seorang pun yang lebih berhak darimu untuk memegang urusan ini. Ali berkata, jika kalian tetap bersikeras maka aku ingin kembali pembataitanku tidak dilakukan secara rahasia. Lalu ali pergi ke masjid dan orang-orang membaitnya. Abu badulah berkata aku hanya mendengarkan hadist ini dari ali dan hadist ini sungguh mengabungkan.⁵⁴



Ibnu kasir menuturkan, sa'id bin umar meriwayatkan dari sejumlah senya, mereka berkata, madinah bertahan lima hari pasca terbunuhnya umar dibawah kendali ghfaqi bin harb. Orang-orang mencari siapa yang merespon untuk mengurus khilafah. Orang-orang mesir mendesak ali, namun ali menjauhi mereka menuju kebun-kebun kurma. Orang-orang khufa mencari zubair namun tidak menemukannya. Orang-orang basra mencari talha namun talha tidak memenuhi tuntutan mereka.

Mereka kemudian berkata, kami tidak akan mengangkat seorang pu dianata tiga orang tersrbut sebai pemimpin. Setelah itu mereka menemui sa'ad bin abi waqos lalu berkata, engkau termasuk anggota syuro. Namu saat tdiak menerima tawaran mereka. Setelah itu mereka menemui ibnu umar namun ibnu umar enggan memenuhi permintaan mereka. Mereka akhirnya bingung lalu bilang, jika kami kembali kekota asal dengan

⁵⁴ Al-Musnad Min Masa'il Al-Imam, Al Khalal, Hal,63

membawa berita kematian usman tanpa adanya pengganti, orang-orang pasti berselisih dan kami pun tidak bisa mejamin atas keselamatan kami.

Mereka akhirnya kembali dan mendesaknya asytar anakha'i meraih tangan ali dan membaitnya. Peristiwa ini terjadi pada hari kamis tanggal 24 julhijah pembaitan ini terjadi setelah ali bertanya kepada semua pihak, dan semua mengatakan, tidak ada yang pantas menjadi khalifah selain ali. Pada hari jum'at, ali naik mimbar lalu dibaiaat oleh orang-orang yang belum membait pada hari sebelumnya⁵⁵.

d. Metode pengangkatan imamah

Dari pemaparan suksesi para sahabat dapat disimpulkan Metode pengangkatan imamah dalam islam ada dua yaitu: pemilihan dan wasiat:

a. Pemilihan

Pemilihan imam dilakukan oleh *ahlul ahlli wal aqdi*. Cara inilah yang dilakukan oleh subsensi kepemimpinan abu bakar asyidiq dan ali bin abi thalib.

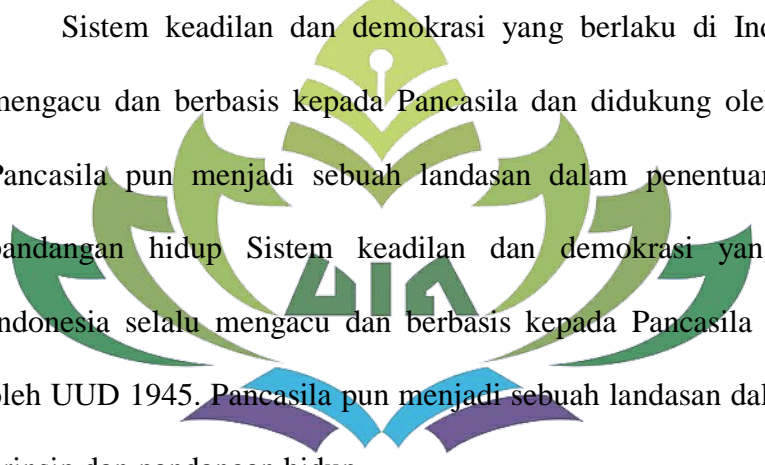
b. Al-ahdu atau wasiat istikhlaf

Metode pengukuhan imamah lainnya adalah lewat wasiat dari khalifah kepada seseorang yang ia pilih diantara kaum muslimin untuk mengantikannya. Ketika seseorang khalifah

⁵⁵ Prof. Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, Imamah Uzma, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam", (Jakarta: Ummul Qura, 2016), Hal 177-182

merasa ajalnya sudah dekat dan bermaksud mendak menjunjuk seseorang sebagai pengganti untuk memimpin kaum muslimin, ia harus bermusyawarah dengan ahlul ahli wal aqdi terkait orang-orang yang akan ia pilih. Apa bila pandangannya tertuju kepada seorang yang layak memegang jabatan ini akan disetujui oleh ahlul ahli wal ahdi, maka ia boleh mewasiatkan khilafah kepada orang yang ia pilih sepeninggalan ia nanti⁵⁶.

2. Pengangkatan Pemimpin Dalam Sistem Politik Indonesia



Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis kepada Pancasila dan didukung oleh UUD 1945. Pancasila pun menjadi sebuah landasan dalam penentuan prinsip dan pandangan hidup. Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis kepada Pancasila dan didukung oleh UUD 1945. Pancasila pun menjadi sebuah landasan dalam penentuan prinsip dan pandangan hidup.

Nilai Demokrasi di Indonesia terdapat dalam Sila ke-4 Pancasila berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan". Sila ke-4 merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak dari pada sifat demokrasi Negara Indonesia. Berkat sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila ke-4 mengandung pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berke-

⁵⁶ Ibid, hal.182-215

Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Binatang banteng (Latin: *Bos javanicus*) atau lembu liar merupakan binatang sosial, yang sama halnya dengan manusia. Pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia.

Konsepsi kedaulatan rakyat atau demokrasi jelas terkandung dalam UUD 1945. Dari pembukaan sampai ke Pasal dan ayat-ayatnya jelas terkandung konsepsi Kedaulatan Rakyat. Dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “....dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip kedaulatan rakyat juga tercantum dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip kedaulatan rakyat tersebut juga nampak dalam seluruh mekanisme dan prosedur yang terdapat dalam UUD 1945. Mulai dari prosedur rekrutmen politik, kekuasaan, legislasi, pajak dan pemilu mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat dengan konsep perwakilan.

Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di

dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan dilakukan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini, diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia. Baik dalam pemilihan presiden/wakil presiden, gubernur, bupati, kepala desa, bahkan ketingkat RT pun dilakukan dengan cara demokrasi. RT termasuk kedalam lembaga kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaa tata cara pemilihan nya diatur dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Empat Lawang. pemilihan ketua RT diatur dalam pasal 10 ayat 1 : Pengurus RT

terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.⁵⁷

Adapun tata cara penyelenggaraan pemilihan ketua RT sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor: 7 Tahun 2018 pasal 12 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Empat Lawang :

1. Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh Panitia pemilihan Ketua RT;
2. Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk melalui musyawarah warga RT setempat yang difasilitasi oleh RW yang tertuang dalam berita acara pembentukan panitia pemilihan ketua RT
3. Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan ketua RT dengan musyawarah mufakat yang tertuang dalam berita acara musyawarah mufakat pemilihan ketua RT.
4. Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang laporannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.⁵⁸

Musyawarah RT merupakan musyawarah yang dilakukan oleh penduduk RT setempat dan merupakan musyawarah tertinggi tingkat RT.

Adapun landasan hukum tentang musyawarah RT diatur dalam :

1. Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.

⁵⁷ Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor: 7 Tahun 2018 pasal 10 ayat 1 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Empat Lawang

⁵⁸ Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor: 7 Tahun 2018, *Opcit*, pasal 12

2. Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk:
 - a. Memilih Ketua RT;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus.
3. Musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
4. Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT.

Dengan demikian pengangkatan pemimpin diindonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diindonesia yaitu berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Setiap masyarakat harus menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil- wakil yang dipercayanya.

Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat

melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai ini menganut paham demokrasi. Akan tetapi, saat ini Indonesia sudah menggunakan paham liberalis, yaitu dimana setiap individu mempunyai hak penuh untuk menentukan pilihan. Dan cara pemilihan ini biasanya dengan cara votting.

Sejak kemerdekaan hingga sekarang bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum, dari pengalaman sebanyak itu pemilihan umum tahun 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan dan keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dengan kondisi yang vacuum, melainkan berlangsung berlangsung didalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan pemilihan umum itu sendiri juga dapat diketahui ada nya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.⁵⁹ Berikut sejarah singkat pemilihan umum di Indonesia

a. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Sebenarnya pemilihan umum sudah direncanakan mulai bulan oktober 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh kabinet burhanudin harahap pada tahun 1955. Pada pemilihan umum itu pemungutan suara dilakukan dua kali untuk memilih anggota DPR pada bulan september dan satu kali untuk memilih anggota konstituante pada bulan desember. Sistem pemilihan yang digunakan ialah sistem proporsional. Pada waktu itu sistem itu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Belanda,

⁵⁹Prof. Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017),hal. 473.

merupakan satu satunya sistem yang dikenal dan dimengerti oleh para pemimpin negara saat itu.

Pemilihan umum dalam suasana khidmat dan sangat demokratis, tidak ada pembatasan partai-partai, tidak ada usaha pemerintahan untuk mengintervensi terhadap partaisekalipun kampanye berjalan seru, terutama antara Masyumi dan PNI.

Pemilihan umum menghasilkan 27 partai dan satu perorangan, dengan jumlah total 257 kursi. Sekalipun jumlah partai bertambah dibanding jumlah partai sebelum pemilihan umum, namun ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu : Masyumi, PNI, NU, dan PKI.

Namun stabilitas politik sangat diharapkan dari pemilihan umum tidak terwujud. Kabinet ali (i dan ii) yang memerintah selama dua tahun dan terdiri atas koalisi 3 besar : Masyumi, PNI, NU, ternyata tidak kompak dalam menghadapi persoalan, terutama yang terkait dengan konsepsi presiden yang diumumkan pada tanggal 21 februari 1957. Karna sebagaian partai koalisi tidak menyutujuinya, akhirnya beberapa menteri dari Masyumi keluar dari kabinet. Dengan pembubaran konstituante oleh presiden soekarno zaman demokrasi parlementer berakhir dan kemudian mulai zaman demokrasi terpimpin.⁶⁰

b. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sesudah mencabut maklumat pemerintah november 1945 tentang kebebasan mendirikan partai, presiden soekarno mengurangi jumlah

⁶⁰Prof. Miriam Budiardjo, *Opcit.* Hal.473-474

partai menjadi 10. Kesepuluh partai ini yaitu Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Tindo, Partai Muba, PSII Arudji, IPKI, Dan Partai Islam Perti, kemudian ikut dalam pemilihan umum 1971 dimasa orde baru. Dimaa demokrasi terpimpin tidak diadakan pemilu.⁶¹

c. Zaman demokrasi pancasila (1965-1998)

Sesudah runtuhnya sistem demokrasi terpimpin yang semi-otoriter ada harapan besar dikalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil salah satunya cara ialah melalui sistem pemilihan umum. Berbagai forum diskusi diadakan untuk memperbincangkan masalah yang dihadapi. Pada saat itu diperbincangkan tidak hanya sistem proporsional yang sudah lama dikenal, tetapi juga sistem distrik yang diindonesia masih sama sekali baru. Sistem distrik ini diharapkan dapat mengurangi jumlah partai politik secara alami tanpa ada paksaan. Dengan berkurangnya jumlah partai politik diharapkan dapat membawa kestabilan politik dan pemerintah akan lebih berdaya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, terutama dibidang ekonomi. Namun putusan seminar kemudian dituangkan dalam RUU ditolak oleh partai partai dalam DPR pada tahun 1967.

Sebagai akibatnya, sistem proporsional tahun 1955 tetap menjadi pilihan namun dengan beberapa modifikasi. *Pertama*, setiap daerah tingkat dua (kabupaten/kotamadya) dijamin mendapat satu kursi di

⁶¹Ibid, Hal.474

DPR. Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan jumlah anggota DPR dari Jawa dan luar Jawa. *Kedua*, dari 460 anggota DPR, 100 diantaranya diangkat, yaitu 75 dari anggota ABRI dan 25 lainnya non-ABRI. Yang non ABRI ini diangkat dari utusan golongan dan daerah. Berdasarkan kompromi antara partai-partai dan pemerintah, yang dinamakan konsensus nasional, maka pemilihan umum 1971 diselenggarakan dengan 10 partai. Untuk perimbangan jumlah anggota parlemen dan penduduk dibuat perbandingan 1:400.000.⁶²

Karena gagal menyederhanakan sistem partai lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soekarno mulai mengadakan tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama ialah mengadakan fusi di antara partai-partai. Dihadapan partai-partai, Presiden Soeharto pada tahun 1973 mengemukakan saran agar mereka mengelompokkan diri dalam tiga golongan yaitu golongan spiritual, golongan nasionalis, golongan karya. Sehingga hanya tinggal tiga partai politik yaitu : Golkar, PPP, PDI.⁶³

Maka mulai tahun 1977 pemilihan umum diselenggarakan dengan menyertakan tiga partai. Dan Golkar selalu menang secara menyakinkan dan meraih kedudukan mayoritas mutlak.

d. Zaman Reformasi

Reformasi membawa perubahan fundamental. *Pertama*, dibukanya kesempatan kembali untuk bergeraknya partai politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru. Ketentuan ini kemudian tercermin

⁶²Ibid, hal. 476

⁶³Rusti Karim, *Perjalanan Partai Politik Indonesia*, (Jakarta : Cv Rajawali, 1983), Hal.172

dalam pemilihan umum 1999 yang diselenggarakan dengan disertai banyak partai. *Kedua*. Pada pemilihan umum tahun 2004 untuk pertama kali dalam sejarah indonesia diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR. *Ketiga*. Diadakan pemilihan umum untuk suatu badan baru, yaitu DPD yang mewakili kepentingan daerah secara khusus. *Keempat*. Diadakan “electoral threshold” yaitu ketentuan bahwa pemelihan legislatif setiap partai harus meraih minimal 3% jumlah kursi anggota legislatif pusat. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, partai politik minimal harus memperoleh 3% jumlah kursi dari badan yang bersangkutan atau 5% dari jumlah suara nasional.

Pemilu tahun 1999 diikuti oleh tiga partai orde baru dan ditambah sejumlah partai yang baru. Sehingga total jumlah 48 partai, yang kemudian berhasil masuk DPR adalah 21 partai. Sistem pemilu yang digunakan tidak jauh berbeda dengan sistem-sistem sebelumnya. Landasan hukumnya adalah UU No 2 Tahun 1999.

Pada tahun 2004 diadakan tiga pemilihan umum, yaitu *pertama*. pemilihan legislatif, sekaligus untuk memilih anggota DPD. *Kedua*. Pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama. *Ketiga*. Pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua.

Pemilihan legislatif berdasarkan UU No 12 Tahun 2003, dan diikuti 24 partai, tujuh diantaranya masuk dpr, yaitu Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Pemilihan umum presiden dan

wakil presiden secara langsung diselenggarakan pada tahun 2004 dengan sistem dua putaran. Artinya, kalau pada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh jumlah suara minimal yang telah ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan dua pasang calon yang memperoleh suara terbanyak.⁶⁴



⁶⁴ Ibid, hal.483-484.

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN TANJUNG KUPANG KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG SUMSEL

A. Profil Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel

1. Sejarah Singkat Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Pada bagian pendahuluan telah diuraikan bahwa lokasi penelitian adalah di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel. Berikut ini dipaparkan gambaran mengenai Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel. kelurahan yang diterbentuk tahun 2009, Sebelum menjadi kelurahan tanjung kupang statusnya masih desa tanjung kupang. Pada saat itu desa tanjung kupang masuk wilayah pemerintahan kabupaten lahat, setelah terjadi pemekaran kabupaten, desa Tanjung Kupang masuk kewilayah Kabupaten Empat Lawang. Melalui proses yang panjang akhirnya desa tanjung kupang dijadikan kelurahan dikarenakan letaknya yang strategis dan menjadi pusat pemerintahan kabupaten Empat Lawang.⁶⁵

2. Visi, Misi Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel

- a. **Visi** “Terwujudnya Kelurahan yang Berorientasi Pelayanan Publik, Lingkungan yang Tertib dan Dihuni Masyarakat yang Berbudaya”

⁶⁵ Wawancara dengan Jonis tokoh masyarakat setempat, tanggal 01 desember 2018.

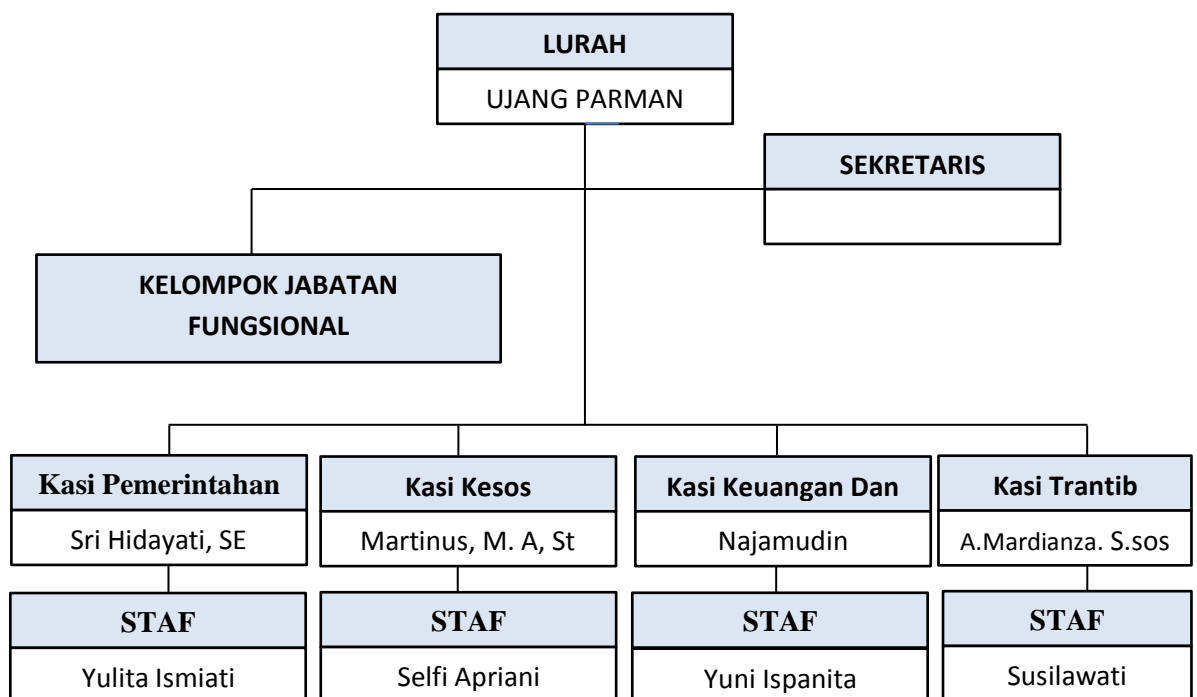
b. Misi

- 1) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 2) Meningkatkan Koordinasi, Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana Prasarana Lingkungan sesuai Kewenangan
- 3) Mengembangkan Modal Sosial dan Ekonomi Mikro melalui Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Menyediakan dan Memelihara Kebutuhan Fasilitas Kantor
- 5) Meningkatkan Kinerja Aparatur

3. Struktur Organisasi Dan Ketenagaan Di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel

Untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaan maka dibuat struktur organisasi kelurahan, yang meliputi pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

GAMBAR 1



4. Daftar nama perangkat kelurahan tanjung kupang kecamatan tebing tinggi

- a. Nama Kelurahan : Tanjung Kupang
- b. Nama Aparatur/Pejabat
 - 1) Lurah : Ujang Parman
 - 2) Kasi Pemerintahan : Sri Hidayati, SE
 - 3) Kasi Kesos : Martinus, M. A, St
 - 4) Kasi Trantib : Asep Mardianza. S. Sos
 - 5) Staf/Sekdes : Najamudin
 - 6) Staf : Yunita Islamiati
- c. Nama Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1) Ketua LMP : Hif Jon Effendi
 - 2) Ketua LPA : Ahmad Sahri
 - 3) Ketua TP-PKK : Robiatul Hadawiyah
 - 4) Ketua Karang Taruna : Yunardi
 - 5) Ketua Posyandu : Jausa
- d. Nama Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1) Ketua RW 01 : Firdaus
 - a. Ketua RT 01 RW 01 : yunardi
 - b. Ketua RT 02 RW 01 : Wanda Afroza
 - c. Ketua RT 03 RW 01 : Rismedi
 - 2) Ketua RW 02 : RM. Amancik
 - a. Ketua RT 01 RW 02 : Syarifudin

- b. Ketua RT 02 RW 02 : Darmawi
- c. Ketua RT 03 RW 02 : M. Dahsyat
- 3) Ketua RW 03 : A. Kopli
 - a. Ketua RT 01 RW 03 : Saipul Anwar
 - b. Ketua RT 02 RW 03 : Abdul Rahman
 - c. Ketua RT 03 RW 03 : Agus Salim
- 4) Ketua RW 04 : Ngadirun
 - a. Ketua RT 01 RW 04 : Kgs. M. Ali
 - b. Ketua RT 02 RW 04 : Siswo Siwito
 - c. Ketua RT 03 RW 04 : Suhartoni
- 5) Ketua RW 05 : Zakaria
 - a. Ketua RT 01 RW 05 : Juni Abdul Gufur
 - b. Ketua RT 02 RW 05 : Irwanto
 - c. Ketua RT 03 RW 05 : Efri Marliato
- 6) Ketua RW 06 : Fran Hernawan
 - a. Ketua RT 01 RW 06 : Jhon Hepni
 - b. Ketua RT 02 RW 06 : Azhari
 - c. Ketua RT 03 RW 06 : Jam'am Efansyah
- 7) Ketua RW 07 : Feri Nugraha
 - a. Ketua RT 01 RW 07 : David Arabanico
 - b. Ketua RT 02 RW 07 : Riduan S
 - c. Ketua RT 03 RW 07 : Rano Handoko

- 8) Ketua RW 08 : Fatahulla
- a. Ketua RT 01 RW 08 : Laras Tri Setia
- b. Ketua RT 02 RW 08 : Yanto
- c. Ketua RT 03 RW 08 : Sutarta
- 9) Ketua RW 09 : Eli Marlina
- a. Ketua RT 01 RW 09 : Rismunadi
- b. Ketua RT 02 RW 09 : Adi Chandra
- c. Ketua RT 03 RW 09 : Feri Jaya
- 10) Ketua RW 10 : Amrul Asin
- a. Ketua RT 01 RW 10 : N. Den
- b. Ketua RT 02 RW 10 : Dian

5. Rekapitulasi Penduduk Tahun 2018

No.	RW	RT	L	P	Jumlah	KK		
						L	P	Jumlah kk
1	01	01	121	132	253	58	9	67
2	01	02	90	70	160	38	12	50
3	01	03	105	115	220	49	6	55
4	02	01	74	82	156	43	4	47
5	02	02	91	76	167	43	4	47

6	02	03	100	85	185	43	4	47
7	03	01	194	181	375	83	2	85
8	03	02	81	82	163	20	8	28
9	03	03	89	80	169	37		37
10	04	01	92	96	188	51	1	52
11	04	02	79	75	154	49	1	50
12	04	03	56	64	120	33		33
13	05	01	103	85	188	33	2	35
14	05	02	78	80	158	34	2	36
15	05	03	104	85	189	45	5	49
16	06	01	116	77	193	44	5	49
17	06	02	136	119	255	62	4	66
18	06	03	145	130	275	70	4	74
19	07	01	71	84	155	30	4	34
20	07	02	138	140	178	55		55
21	07	03	94	84	178	42		42

22	08	01	116	105	221	56		56
23	08	02	102	97	199	45		45
24	08	03	77	84	161	40		40
25	09	01	97	87	184	43		43
26	09	02	53	56	109	40		40
27	09	03	140	144	285	82	4	86
28	10	01	86	74	160	35	5	40
29	10	02	135	117	252	64	12	76
Jumlah			2963	2786	5749	1368	97	1465

B. Praktik Demokrasi Pemilihan Aparatur Desa Di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan, di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.⁶⁶

Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan pasal Pasal 29 (1) yaitu : Pengurus lembaga kemasyarakatan

⁶⁶ Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan pasal 18

dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;⁶⁷

Menurut pasal 1 Ayat 9 Peraturan Bupati No 9 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan rukun warga di kabupaten empat lawang yaitu Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.⁶⁸ Dari kedua undang-undang tersebut dapat kita simpulkan untuk membentuk dan melantik ketua RT dilakukan secara musyawarah oleh penduduk setempat, musyawarah dan mufakat tersebut bisa dilakukan baik dengan cara pemilihan langsung maupun usulan dari masyarakat setempat. Biasanya kalau dipilih secara langsung calon ketua RT nya lebih dari satu dan di pilih oleh kepala keluarga dari masing-masing kepala keluarga yang tercantum di KK, misalkan kalau kepala keluarga nya berhalangan hadir maka diwakilkan oleh pihak keluarga lain dengan bukti membawa KTP dan KK saat ditempat pemilihan. Sedangkan lewat usulan masyarakat, masyarakat hanya perlu menyiapkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala keluarga bahwa mereka menyetujui si A menjadi ketua RT dan saya sebagai lurah tinggal mengesahkan dan memberikan SK nya sebagai ketua RT. Untuk melaksanakan pemilihan tersebut, biasanya Pembentukan panitia

⁶⁷ Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan pasal 29 ayat 1

⁶⁸ Peraturan Bupati No 9 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan rukun warga di kabupaten empat lawang pasal 1 ayat 9

pemilihan ketua RT periode berikutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT dimaksud⁶⁹.

Berdasarkan penuturan bapak Nurdin bahwa, “praktek pemilihan RT disini biasanya setiap orang yang mau mencalonkan diri sebagai ketua RT, dia menghadap orang yang dianggap dia berpengaruh disana dan meminta rekomendasi ke tokoh masyarakat tersebut, dan tokoh masyarakat tersebut meminta saran warga bagaimana kalau kita menjadikan si A menjadi RT, misalkan kalau masyarakat banyak yang setuju, tinggal mengajukan proposal kepada lurah supaya terjadi pergantian RT yang baru”⁷⁰.

Penuturan bapak Santoso bahwa, “praktek pemilihan RT disini biasanya diusulkan oleh orang yang berpengaruh di wilayah tersebut, biasanya lewat persetujuan berapa kepala keluarga yang dipandang sebagai tokoh masyarakat lah, adapula dilakukan secara pemilihan langsung pernah sekali waktu tahun belakang pemilihan RT dilakukan secara pemilihan dikarnakan calon nya waktu itu banyak kalau tidak salah ingat sekitar 4 calon RT”⁷¹.

Penuturan bapak Alamsyah bahwa, “praktektek pemilihan RT disini biasanya dilakukan secara musyawarah dipilih langsung oleh masyarakat, biasanya tempat pemilihan nya dimasjid setelah solat isya, baik yang disuruh memilih yaitu kepala keluarga di dalam kartu keluarga,

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Ujang Parman selaku lurah tanjung kupang, 05 desember 2018

⁷⁰ Wawancara dengan bapak nurdin selaku tokoh masyarakat setempat, 01 desember 2018

⁷¹ Wawancara dengan bapak santoso selaku tokoh masyarakat setempat, tanggal 01 desember 2018.

misalkan kepala keluarganya tidak hadir maka diwakilkan oleh pihak keluarganya dengan membawa KK sebagai buktinya”.⁷²

Syarat-syarat menjadi ketua RT yaitu berdasarkan Peraturan Bupati No 9 Tahun 2018 pasal 11 ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b) Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c) Bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan;
 - d) Dapat membaca dan menulis aksara dan;
 - e) Syarat-syarat lain ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT.
2. Ketua dan atau pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus RW dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.⁷³

Masa jabatan pengurus RT diatur dalam pasal 14 ayat 1 sampai 4 yaitu sebagai berikut:

1. Masa bakti pengurus RT adalah 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Lurah.
2. Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya.

⁷² Wawancara dengan bapak Alamsyah selaku tokoh masyarakat setempat, tanggal 01 desember 2018.

⁷³ Peraturan Bupati No 9 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan rukun warga di kabupaten empat lawang pasal 11 ayat 1 dan 2

3. Pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT dimaksud.⁷⁴

Menurut bapak Jhon Hepni selaku ketua RT 01 RW 06 Pengurus RT dapat berhenti atau diberhentikan apabila masa jabatan nya sudah habis, permintaan diri secara tertulis, pindah tempat tinggal/keluar wilayah RT yang bersangkutan, telah habis masa baktinya, telah dilantik pengurus RT yang baru. Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut atau sementara tugas dan wewenangnya diisi oleh RW selama belum ada calon RT yang baru.⁷⁵

Menurut bapak azhari selaku ketua RT 02 RW 06 Pengurus RT dapat diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena tidak dapat melaksanakan tugas nya sebagaimana mestinya misalnya terjadi kecelakaan yang cukup parah sehingga mengakibatkan dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

⁷⁴ Peraturan Bupati No 9 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan rukun warga di kabupaten empat lawang pasal 14

⁷⁵ Wawancara dengan Jhon Hepni selaku ketua RT 01 RW 06, tanggal, 3 desember 2018

norma adat istiadat masyarakat setempat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat istiadat masyarakat setempat.⁷⁶ Masa jabatan ketua RT dikelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang adalah 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Lurah. Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya yang bisa dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat setempat.⁷⁷

Menurut bapak Hermansyah pemilihan ketua RT khusus nya dikelurahan tanjung kupang tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan tidak dilakukan pemilihan langsung, tiba-tiba dilantik ketua RT yang baru, dan seharusnya ada pemberitahuan dulu dari pihak kelurahan bahwa ada pergantian jabatan dan pemilihan ketua RT baru, sehingga masyarakat setempat bisa melaksanakan dan menikmati proses demokrasi ditingkat RT.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan azhari selaku ketua RT 02 RW 06, tanggal, 3 desember 2018

⁷⁷ Wawancara dengan Jam'am Efansyah selaku ketua RT 03 RW 06, tanggal, 3 desember 2018

⁷⁸ Wawancara dengan hermansyah selaku masyarakat setempat, tanggal, 3 desember 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaa Pemilihan Ketua RT Di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Sehingga menuntut manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lain, perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak dalam proses ineraksi tersebut.

Pemilihan ketua RT dikelurahan Tanjung Kupang termasuk kedalam interaksi manusia dalam menyampaikan pendapat maupun berpartisipasi didalam demokrasi ditingkat kelurahan ini. Sesuai Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berisi “ kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang - undang dasar.”⁷⁹ Yang merupakan dasar hukum negara indonesia sebagai negara yang demokratis, tidak hanya ini diperjelas juga oleh pancasila sila ke-4 yang berisi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan”. Yang artinya sila ini tentang demokrasi, demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengesuhakan keputusan secara bulat, yang dimaksud secara bulat tersebut adalah hasil yang diambil dengan kesepakatan bersama secara bersama dan mufakat untuk mendapatkan

⁷⁹ UUD NRI 1945

hasil yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat.

Pemilihan RT dikelurahan Tanjung kupang kabupaten empat lawang diatur dalam Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan pasal Pasal 29 (1) yaitu : Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;⁸⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa pelaksanaa pemilihan ketua RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi yang sudah tertera dalam Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan, yang pemilihannya dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat yang berada dikelurahan Tanjung Kupang. tapi dalam praktenya pembentukan RT dikelurahan Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang belum dilakukan secara demokrasi, dikarnakan dari 29 ketua RT hanya 2 RT yang pernah pemilihannya dilakukan secara langsung atau secara musyawarah sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku diindonesia. Jadi kesimpulannya dari penulis tinggal penerapan peraturannya saja yang perlu ditingkatkan lagi karna masih banyak proses penerapan nya yang masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁸⁰ Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahan

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaa Pemilihan Ketua RT Di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi

Pemilihan ketua RT di kelurahan Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang hampir sama dengan wilayah lain, akan tetapi tata cara dan peraturannya saja yang mungkin berbeda, dikarenakan setiap daerah memiliki peraturan masing-masing dalam mekanisme pemilihan RT sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Di kelurahan Tanjung Kupang sendiri pemilihan ketua RT dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.

Dalam konsep Islam dikenal dengan syura, Secara etimologi kata “syura” berasal dari kata *sya-wa-ra* yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syuro merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia.

Syura (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islam dan pada prinsipnya syura mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Ketentuan Qur’ani disampaikan dalam term-term yang tidak hanya berisikan masalah-masalah pemerintah tetapi juga mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dan pekerja. Dan sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat.

Salah satu contoh nabi Muhammad SAW merupakan orang yang demokratis yaitu mendirikan negara Madinah berdasarkan kontrak sosial (al ‘aqd al ijtima’i) antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, Kristen, dan kaum Arab pagan yang berdiam di Madinah dan membentuk piagam madinah sebagai UUD yang berlaku di Madinah. Sebagai mana firman Allah SWT :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Sebab-sebab turun ayat ini kepada nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ra menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar ra dan Umar Bin al-Khattab ra untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang, Abu Bakar ra berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kekeluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun, Umar bin al-Khattab berpendapat mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintahkan membunuh mereka adalah keluarganya. Rasulullah SAW

kesulitan dalam memutuskan perkara ini. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas Abu Bakar.⁸¹

Adapun hadits nabi tentang musyawarah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ. (رواه الترمذي و ابو داود).

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda “ Musyawarah adalah dapat di percaya.” (HR. At tirmidzi dan Abu daud).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaa Pemilihan Ketua RT Di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dikarnakan konsep didalam Islam dalam menentukan pemimpin dilakukan dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan yang bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Meskipun penerapan nya sendiri tidak sama persis dengan konsep Islam tapi masih sejalan dan tidak bertentangan.

⁸¹ Departemen agama ri, alquran tafsir perkata tajwid kode angka al-hidayah. (banten : karim, 2011) hlm ,72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai penerapan demokrasi dalam pemilihan RT di kelurahan di kelurahan tanjung kupang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Empat Lawang No 10 Tahun 2009 tentang kelurahanl Pasal 29 (1) yaitu : Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan aparatur kelurahan di kelurahan tanjung kupang khusus nya pemilihan ketua RT dapat dikatakan belum terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku dikabupaten empat lawang. Dikarnakan masih banyak yang perlu diperbaiki lagi, masih banyak kekurangan yang terjadi dimana-mana seperti, masih belum diterapkannya sepenuhnya peraturan yang berlaku tentang bagaimana proses pemilihan ketua RT tersebut, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya proses pembentukan pengurus RT yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dikeluarahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
2. Pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan ketua RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam

Islam itu sendiri. Karena, Islam mengajarkan kita mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, apalagi dalam menuntukan pemimpin sebaiknya dilaksanakan dengan cara musyawarah. Dalam konsep Islam musyawarah dikenal dengan syura, Secara etimologi kata “syura” berasal dari kata sya-wa-ra yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata syura dalam bahasa indonesia menjadi musyawarah mengandung makna sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syuro merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia. Sesuai dengan hadits Rasulluloh SAW sebagai berikut yang artinya: *“Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda “ Musyawarah adalah dapat di percaya.” (HR. At tirmidzi dan Abu daud)”*⁸². Dan hadits kedua Rasulluloh SAW menganjurkan kita untuk bermusyawarah yaitu artinya sebagai berikut, *dari Abi Said al-Khudriy, sesungguhnya Rosululloh saw bersabda : ketika tiga orang keluar dalam (untuk) bepergian maka hendaklah mereka menjadikan salah satu mereka (sebagai) amir/pemimpin.(Hr. Ibnu Daud)*⁸³.

Dari kedua hadits diatas dapat disimpulkan bahwa Rasulluloh tidak melarang bermusyawarah dalam menentukan pemimpin.

⁸² Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), jilid. 1, hal. 203

⁸³ No. 2608. Asy-Syaikh al-Albani *rahimahullah* berkata dalam *ash-Shahihah* no. 1322, “Sanadnya hasan.” No. 2608. Asy-Syaikh al-Albani *rahimahullah* berkata dalam *ash-Shahihah* no. 1322, “Sanadnya hasan.”

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat kelurahan tanjung kupang kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang lebih aktif lagi dalam proses demokrasi yang dilaksanakan ditingkat kelurahan tanjung kupang, agar kita bisa merasakan pesta demokrasi dan dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin diwilayah kelurahan tanjung kupang.
2. Islam sangat memprioritaskan dalam mengambil keputusan untuk menentukan pemimpin sebaiknya dilaksanakan secara musyawarah mufakat, maka kepada masyarakat hendaknya kita menerapkan nilai nilai musyawarah dan sebagai umat Islam selalu menjaga hubungan kita sesama masyarakat, menjaga lingkungan, senantiasa mendekatkan diri kepada allah dan bersosialisasi dengan masyarakat.
3. Kepada para pecinta ilmu pengetahuan, mudah mudahan tulisan ini memberikan informasi yang positif dan dapat berguna bagi kehidupan kita.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TAFSIR

Dapartemen Agama Ri, Alquran Dan Tafsirnya ”*Edisi Yang Disempurnakan*”, Jakarta : Lentera Abadi, 2010.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan, Keserasian Al- Quran”, Vol.2, Jakarta : Lentera Hati, 2012

M. Nasib Ar Rifa’i , Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir, Jakarta : Gema Insane, 2012

BUKU HADITS

Achamad Suriri, S.IP, MA , Bulughul Maram “ Hadits Hukum - Hukum Syariat Islam “, Surabaya : PT Bima Ilmu, 1996

Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), jilid. 1,
Al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabir*, jilid. 11,

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu Wal Marjan*, Himpunan Hadist Sahih Yang Desepakati Oleh Bukhari Dan Muslim, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1996.

Muhammad Nashirudin Al- Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta : Pustaka Assunah, 2009
Subhi Salih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*, Cet.V, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.

BUKU FIQH

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Termologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2015,

Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakatra:Kencana 2014.

Dr. J. Suyuthi Pulungan, M. A., *Fiqh Siyasah “ Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran”*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dan Syariat Islam*, Bekasi: Darul Falah, 2017.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jihad, Pengadilan Dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan Dalam Islam*, Jakarta: Gemma 2007

Prof. H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Kencana 2003.

Prof. Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, Imamah Uzhma, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, Jakarta: Ummul Qura, 2016

BUKU UMUM

A. Sahid Gatarah Fh, M.Si Dan Moh. Dzulkiah, M.Si, Sosiologi Politik “ Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007

A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

A Rahman H.I, System Politik Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007

Abdul Khadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti 2004).

AL-‘ADALAH Vol. X, No. 3 Januari 2012, Irwantoni: Peranan Siyâsah Syar’iyyah dalam Memahami Nas-Nas Agama, diakses 20 februari 2018.

Astry islam, muadz bin jabal “*cendikiawan muslim yang menguasai ilmu fiqh serta paling tau hal dan haram*”, (Bandung : titian ilmu, 2007).

Dede Rosyada dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003),

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008)

Hania Hanafiah Dan Suryani, Politik Indonesia, Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia , studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Yogyakarta : Liberty, 1993,

Peraturan Bupati No 9 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan rukun warga di kabupaten empat lawang

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan.

Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2015 tentang kelurahan

Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Abu Bakar Ash- Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)

Prof. Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakaerta: Pt Gramedia Pustsaka Utama, 2017
Rusti Karim, Perjalanan Partai Politik Indonesia,(Jakarta : Cv Rajawali, 1883).

Susisdi As, Metodologi Penelitian, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015.

Sutrisno Hadi, Metode Research, Jilid Satu, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi Ugm, 1981.

UUD NRI tahun 1995.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wawancara dengan bapak Ujang Parman selaku lurah tanjung kupang, 01 desember 2018

Wawancara dengan bapak nurdin selaku tokoh masyarakat setempat, 01 desember 2018

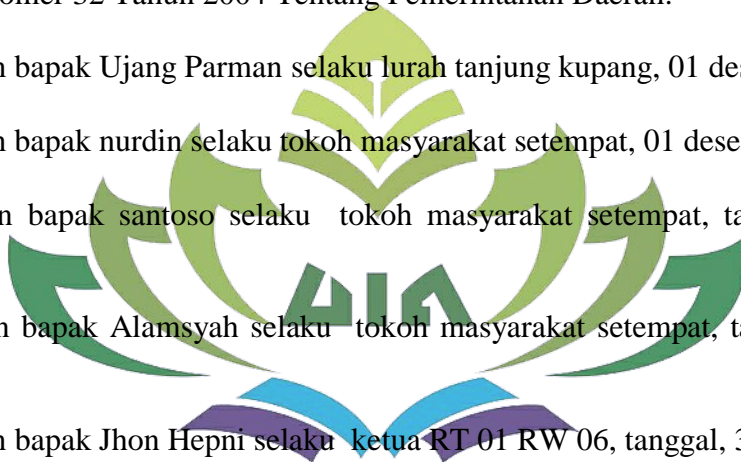
Wawancara dengan bapak santoso selaku tokoh masyarakat setempat, tanggal 01 desember 2018.

Wawancara dengan bapak Alamsyah selaku tokoh masyarakat setempat, tanggal 01 desember 2018

Wawancara dengan bapak Jhon Hepni selaku ketua RT 01 RW 06, tanggal, 3 desember 2018

Wawancara dengan bapak azhari selaku ketua RT 02 RW 06, tanggal, 3 desember 2018

Wawancara dengan bapak Jam'am Efansyah selaku ketua RT 03 RW 06, tanggal, 3 desember 2018





1. Foto Saat mengambil data di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.



**2. Foto saat wawancara dengan pihak Kelurahan Tanjung Kupang
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang**

